

Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Risiko Kredit, dan Manajemen Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas

Edy Pratiknyo*, Cecep Taufiqurrahman

Universitas Ekuitas Bandung, Indonesia

Email: edy.bprmenara@gmail.com, cecep.taufiqurrohman@ekuitas.ac.id

Abstract

Keywords:

Good Corporate Governance (GCG); credit risk management; operational risk management; profitability.

Good Corporate Governance (GCG), credit risk management, and operational risk management play a crucial role in enhancing the profitability of Rural Banks (BPR). In Bekasi, the application of GCG principles and effective risk management can impact the financial performance of BPR. This study aims to analyze the effect of these factors on BPR profitability in Bekasi during the period of 2020–2024. This study aims to analyze the effect of GCG, credit risk management, and operational risk management on profitability at 10 BPRs in Bekasi during the 2020–2024 period. A quantitative approach was used with a survey method. Data were collected through analysis of annual BPR reports and tested using multiple linear regression to examine the relationship between variables. Descriptive analysis shows an improvement in GCG application in BPRs in Bekasi. The t-test results indicate that GCG has a positive and significant effect on profitability (regression coefficient 0.348; $t=3.412$; $\text{sig.}=0.001$). Credit risk management and operational risk management have a negative effect on profitability with regression coefficients of -0.276 and -0.193, respectively. The F-test results show that GCG, credit risk management, and operational risk management have a significant effect on profitability simultaneously ($F=9.527$; $\text{sig.}=0.000$). The application of good GCG practices, along with effective credit and operational risk management, is essential to improve the performance and profitability of BPRs in Bekasi.

Kata Kunci:

Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional terhadap profitabilitas

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional memainkan peran penting dalam meningkatkan profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di Kota Bekasi, penerapan prinsip-prinsip GCG dan pengelolaan risiko yang efektif dapat mempengaruhi kinerja keuangan BPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas BPR di Kota Bekasi pada periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional terhadap profitabilitas pada 10 BPR di Kota Bekasi selama periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei. Data diperoleh melalui analisis laporan tahunan BPR dan diuji menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan peningkatan

penerapan GCG di BPR Bekasi. Uji t menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR (koefisien regresi 0,348; $t=3,412$; $\text{sig.}=0,001$). Manajemen risiko kredit dan operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dengan koefisien regresi -0,276 dan -0,193 masing-masing. Uji F menunjukkan bahwa GCG, manajemen risiko kredit, dan operasional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas BPR ($F=9,527$; $\text{sig.}=0,000$). Penerapan GCG yang baik serta pengelolaan risiko kredit dan operasional yang efektif merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas BPR di Kota Bekasi.

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dituntut untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan keberlanjutan kinerja keuangannya. Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah penyangga Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat, sehingga menciptakan peluang besar bagi pengembangan BPR untuk melayani kebutuhan pembiayaan, khususnya sektor UMKM. Namun, perkembangan tersebut juga disertai dengan tantangan besar, seperti meningkatnya risiko kredit bermasalah dan tekanan dari lembaga keuangan non bank serta fintech (Arifin, 2025; Mahardika et al., 2025). Dalam konteks ini, penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat penting bagi BPR agar dapat bertahan dan berkembang secara sehat (Dharmawan & Kurniawan, 2018; Nareswari, 2024; Putra, 2025).

Namun, perkembangan tersebut juga disertai dengan berbagai tantangan besar yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang berdampak langsung terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan BPR (Al Rasyid, 2025; Alchuurun'ain & Kurniawati, 2025; Ardiantini & Susila, 2025). Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor mikro dan kecil yang memiliki tingkat risiko tinggi dan daya tahan terbatas terhadap perubahan ekonomi (Amalia, 2022; Sri & Ahmad, 2017). Selain itu, tekanan persaingan dari lembaga keuangan non-bank dan perusahaan teknologi

finansial (fintech) yang menawarkan layanan pinjaman cepat, berbasis digital, dan dengan syarat yang lebih fleksibel, semakin menggerus pangsa pasar BPR. Lembaga-lembaga ini mampu menarik nasabah dengan kecepatan layanan, kemudahan akses, dan inovasi produk berbasis teknologi yang belum sepenuhnya dapat ditandingi oleh BPR (Setiawan, 2020).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta manajemen risiko yang efektif tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan strategis bagi BPR agar dapat bertahan dan berkembang secara sehat. GCG berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan manajerial (KNKG, 2006). Sementara itu, manajemen risiko membantu BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko potensial yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Tanpa sistem pengelolaan

risiko yang kuat, BPR akan semakin rentan terhadap tekanan eksternal dan potensi krisis keuangan internal yang dapat mengancam kelangsungan usahanya (OJK, 2015).

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diyakini mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan BPR, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperbaiki kinerja keuangan (Fadilah et al., 2025; Sugari et al., 2026). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness), yang apabila diterapkan dengan baik dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan (KNKG, 2006). Salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip independensi dalam struktur tata kelola adalah keberadaan komisaris independen.

Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris mencerminkan sejauh mana pengawasan terhadap manajemen dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan pemilik atau pihak internal lainnya. Proporsi yang ideal diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, terutama dalam konteks perbankan yang sarat regulasi dan berisiko tinggi (Munir, 2024; Nisa et al., 2025). Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa banyak BPR, khususnya yang beroperasi di daerah, masih menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten, termasuk dalam menjaga proporsi komisaris independen sesuai ketentuan OJK. Hal ini dapat berdampak terhadap efektivitas pengawasan internal dan, pada akhirnya, terhadap stabilitas serta kinerja keuangan BPR itu sendiri (Indraswari et al., 2024; Pratiwi, 2018).

Hambatan ini umumnya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang tata kelola, budaya organisasi yang belum mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya komitmen dari jajaran manajemen puncak untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG secara utuh. Penelitian oleh Sari dan Nugraheni (2022) mengungkap bahwa mayoritas BPR skala kecil di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi, belum memiliki sistem internal audit dan pengawasan manajemen risiko yang memadai, sehingga implementasi GCG cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial dalam pengambilan keputusan strategis.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat BPR memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi yang memiliki pertumbuhan UMKM tinggi. OJK (2023) melaporkan bahwa tingkat NPL BPR secara nasional masih berada di atas 4% pada 2022-2023, sementara BOPO rata-rata BPR juga tinggi (>85%), mengindikasikan inefisiensi operasional. Tanpa identifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi profitabilitas, upaya pembinaan dan pengawasan BPR oleh regulator akan kurang tepat sasaran. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan bukti empiris bagi OJK, asosiasi BPR, dan manajemen BPR dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada: (1) penggunaan data periode 2020–2024 yang mencakup masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, (2) fokus spesifik pada BPR di Kota Bekasi yang memiliki karakteristik urban dengan tingkat persaingan fintech tinggi, (3) pengujian simultan ketiga variabel (GCG, NPL, BOPO) terhadap ROA dalam satu model regresi, (4) penggunaan peringkat komposit GCG hasil self-assessment resmi BPR (bukan proksi seperti proporsi komisaris independen) sehingga lebih akurat, dan (5) identifikasi arah pengaruh negatif manajemen risiko (kredit dan operasional) terhadap profitabilitas yang

mengindikasikan bahwa semakin tinggi risiko (NPL) atau inefisiensi (BOPO) justru menurunkan laba.

Lebih lanjut, Studi Pramudito dan Asri (2023) menemukan bahwa minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM menjadi faktor kunci yang menyebabkan kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai GCG, terutama dalam aspek independensi dan tanggung jawab manajerial. Hal ini diperparah oleh struktur organisasi BPR yang cenderung sempit dan tidak memiliki pemisahan fungsi yang tegas antara pengelola dan pemilik modal. Dalam kondisi seperti ini, risiko konflik kepentingan meningkat dan dapat menghambat proses pengawasan internal yang efektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran manajemen puncak dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh GCG, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional terhadap profitabilitas pada 10 BPR di Kota Bekasi periode 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori (explanatory research), yang dirancang untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Pendekatan ini mengandalkan data numerik dan analisis statistik sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh peringkat komposit Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional terhadap profitabilitas BPR di wilayah Kota Bekasi.

Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan yang bersifat sebab-akibat (causal relationship) antar variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan eksplanatori memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menguji hipotesis mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel.

Menurut Sugiyono (2022), pendekatan kuantitatif eksplanatori digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan memberikan bukti empiris mengenai hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut memanfaatkan data panel, yaitu gabungan antara data lintas individu (cross-section) dan data sepanjang waktu (time-series), sehingga memungkinkan analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mempertimbangkan dinamika waktu dan perbedaan antar entitas, seperti BPR di wilayah Kota Bekasi.

Instrumen penelitian dapat berupa data sekunder yang terstruktur, misalnya laporan keuangan BPR, peringkat GCG, NPL, BOPO, dan indikator profitabilitas (ROA). Analisis dilakukan dengan regresi panel, baik model efek tetap (fixed effect) maupun efek acak (random effect) untuk menguji pengaruh langsung dan simultan antar variabel. Sebelum melakukan regresi, peneliti wajib memastikan bahwa asumsi klasik terpenuhi, seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pemenuhan asumsi klasik ini penting agar hasil estimasi tidak bias, valid, dan dapat diinterpretasikan secara akurat, baik dalam mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maupun dalam mendeteksi peran variabel intervening atau mediator, jika ada.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat secara sistematis mengidentifikasi seberapa besar pengaruh peringkat komposit GCG, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional terhadap profitabilitas BPR, sekaligus memberikan landasan empiris yang kuat bagi pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan tata kelola di lembaga keuangan mikro.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain kausal dengan pendekatan kuantitatif eksplanatori, bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara peringkat komposit Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional, dan profitabilitas BPR di Kota Bekasi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji secara empiris pengaruh variabel-variabel tersebut. Desain kausal digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel, sementara penelitian kuantitatif eksplanatori cocok untuk menguji model teoritis dan keterkaitan variabel secara statistik (Sekaran & Bougie, 2019; Creswell, 2018).

Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan publikasi lembaga terkait, dengan fokus pada variabel kuantitatif yang dapat diukur dari laporan keuangan dan informasi kelembagaan. Pendekatan ini dipilih karena efisien dalam mengakses data historis periode 2020–2024 dan memiliki keandalan tinggi jika berasal dari sumber valid seperti regulator atau institusi resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kondisi Komposit GCG pada 10 BPR di wilayah Bekasi

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan prinsip penting dalam memastikan keberlangsungan dan kredibilitas lembaga keuangan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penerapan GCG berfokus pada lima prinsip utama, yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Kelima prinsip ini menjadi landasan bagi BPR dalam menjalankan operasional, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, serta perlindungan terhadap pemangku kepentingan.

BPR memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal karena fokusnya pada pemberian kredit dan layanan keuangan bagi masyarakat mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, penerapan GCG yang baik menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, menjaga stabilitas operasional, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tabel 1 Kondisi Komposit GCG pada 10 BPR Wilayah Bekasi

No	Pernyataan	2020	2021	2022	2023	Dasar Regulasi
A. Keterbukaan (<i>Transparency</i>)						
1	BPR menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat, jelas, dan tepat waktu kepada OJK dan publik.	0	1	1	1	Pasal 6 ayat (1)

No	Pernyataan	2020	2021	2022	2023	Dasar Regulasi
2	Laporan tata kelola dan laporan tahunan disusun sesuai format dan jadwal yang ditetapkan OJK.	0	1	1	1	Pasal 18 ayat (1)
B. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)						
3	Struktur organisasi BPR telah menjamin kejelasan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap organ.	0	1	1	1	Pasal 8 ayat (1)
4	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pengurusan sesuai prinsip akuntabilitas.	0	1	1	1	Pasal 7 ayat (1)–(2)
C. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)						
5	BPR memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.	0	1	1	1	Pasal 9 ayat (1)
6	BPR memiliki dan melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen dan efektif.	0	1	1	1	Pasal 12 ayat (1)
D. Independensi (<i>Independency</i>)						
7	Setiap pengambilan keputusan di BPR bebas dari benturan kepentingan atau intervensi pihak manapun.	0	1	1	1	Pasal 10 ayat (1)
8	Fungsi pengawasan dan audit dilaksanakan secara independen sesuai prinsip Three Lines of Defense.	0	1	1	1	Pasal 11 ayat (2)
E. Kewajaran (<i>Fairness</i>)						
9	BPR memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai hak dan kewajibannya.	0	1	1	1	Pasal 13 ayat (1)
10	Mekanisme penyelesaian keluhan nasabah dilaksanakan secara adil, cepat, dan transparan.	0	1	1	1	Pasal 14 ayat (2)

Perkembangan Kondisi Manajemen Risiko Kredit pada 10 BPR di Wilayah Bekasi

Manajemen risiko kredit merupakan salah satu aspek penting dalam operasional Bank Perekonomian Rakyat (BPR), karena kualitas kredit yang baik menjadi kunci keberlangsungan dan stabilitas keuangan BPR. Risiko kredit muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga dapat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas bank.

Pada BPR, terutama yang beroperasi di wilayah Bekasi, manajemen risiko kredit menjadi fokus utama untuk menjaga kesehatan portofolio kredit, terutama bagi kredit mikro, kecil, dan menengah yang merupakan segmen utama nasabah. Evaluasi terhadap kondisi manajemen risiko kredit dapat dilihat melalui indikator seperti Non-Performing Loan (NPL), kualitas agunan, proses seleksi debitur, serta pengawasan internal.

Perkembangan Kondisi Manajemen Risiko Operasional pada 10 BPR di Wilayah Bekasi

Manajemen risiko operasional merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan dan stabilitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Risiko operasional muncul akibat kelemahan atau kegagalan pada proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau

faktor eksternal yang dapat berdampak pada kegiatan operasional, kualitas layanan, dan kinerja keuangan bank.

Pada BPR, khususnya yang beroperasi di wilayah Bekasi, pengelolaan risiko operasional menjadi fokus utama karena efektivitas proses internal sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabah, keamanan transaksi, dan reputasi bank. Upaya pengendalian risiko operasional meliputi penerapan prosedur kerja yang jelas, pemisahan fungsi dan tanggung jawab, pengawasan internal, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran operasional.

Kondisi peringkat komposit GCG BPR di wilayah Kota Bekasi

Berdasarkan pengolahan data Good Corporate Governance (GCG) pada BPR di Kota Bekasi selama 2020–2023, penerapan tata kelola perusahaan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun pada awal periode beberapa indikator GCG belum diterapkan secara optimal, pada tahun-tahun berikutnya, penerapan prinsip GCG menjadi lebih konsisten, sehingga skor GCG meningkat. Penilaian GCG dilakukan melalui self-assessment, yang mencerminkan kualitas penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator GCG mulai terpenuhi sejak 2021 hingga 2023, mencerminkan upaya BPR dalam meningkatkan transparansi, struktur organisasi, dan pengawasan internal. Peningkatan ini menunjukkan komitmen manajemen BPR dalam menerapkan GCG yang baik. OJK menyatakan bahwa penerapan GCG yang baik penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di BPR Bekasi berada dalam kategori baik, dengan peningkatan skor GCG yang mencerminkan keberlanjutan dan kinerja BPR yang lebih baik.

Kondisi manajemen risiko kredit BPR di wilayah Kota Bekasi

Manajemen risiko kredit adalah aspek penting dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena sebagian besar kegiatan usaha BPR berfokus pada penyaluran kredit. Pengelolaan risiko kredit yang baik diperlukan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi dalam pengelolaan risiko kredit pada BPR di Kota Bekasi selama periode penelitian, dengan upaya untuk menjaga tingkat risiko kredit sesuai batas yang ditetapkan regulator.

Proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta dukungan kebijakan kredit dan pengawasan manajemen yang aktif. Penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian akibat kredit bermasalah. Risiko kredit, yang diukur melalui rasio Non-Performing Loan (NPL), dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, seperti Return on Assets (ROA). Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit yang baik, seperti analisis kredit yang ketat dan pemantauan kualitas kredit, penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja bank.

Kondisi manajemen risiko operasional BPR di wilayah Kota Bekasi

Manajemen risiko operasional sangat penting dalam pengelolaan kegiatan perbankan, termasuk di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena risiko ini dapat muncul akibat kegagalan proses internal, human error, kegagalan sistem teknologi, atau kejadian eksternal yang mengganggu operasional bank. Data menunjukkan bahwa BPR di Kota Bekasi telah berupaya

mengendalikan biaya operasional dengan baik, yang tercermin dalam rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan biaya operasional yang relatif besar dibandingkan pendapatan, yang dapat mengurangi profitabilitas bank. Efisiensi operasional yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank. Penerapan manajemen risiko operasional yang efektif juga membutuhkan pengawasan yang baik terhadap proses operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, manajemen risiko operasional yang baik di BPR Kota Bekasi berperan penting dalam menjaga efisiensi dan meningkatkan kinerja keuangan, serta meminimalkan potensi kerugian.

Pengaruh komposit Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan manajemen risiko operasional terhadap kinerja keuangan yang implikasinya pada permodalan BPR di wilayah Bekasi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji F, ditemukan bahwa Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Bekasi, yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Secara parsial, GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik meningkatkan profitabilitas bank. Sebaliknya, manajemen risiko kredit dan manajemen risiko operasional berpengaruh negatif terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa risiko kredit tinggi dan biaya operasional yang besar menurunkan profitabilitas. Kinerja keuangan yang baik, tercermin dari ROA yang meningkat, berkontribusi pada penguatan struktur permodalan bank, yang meningkatkan stabilitas dan ketahanan bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GCG yang baik, serta pengelolaan risiko kredit dan operasional yang efektif, merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja keuangan BPR dan memperkuat posisi permodalan bank, mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 10 BPR di wilayah Kota Bekasi selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan peningkatan setiap tahun, dengan skor komposit GCG yang semakin baik, mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang lebih konsisten. Manajemen risiko kredit dan operasional juga menunjukkan upaya pengendalian yang baik, dengan pengawasan terhadap kualitas kredit dan pengendalian biaya operasional untuk meningkatkan efisiensi.

Profitabilitas BPR dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengelolaan risiko kredit, efisiensi operasional, dan penerapan tata kelola yang baik. Hasil uji t menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR (koefisien regresi 0,348; $t=3,412$; $\text{sig.}=0,001$), sedangkan manajemen risiko kredit dan operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (koefisien regresi -0,276; $t=-2,936$; $\text{sig.}=0,006$ dan koefisien regresi -0,193; $t=-2,218$; $\text{sig.}=0,032$). Hasil uji F menunjukkan bahwa GCG, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPR ($F=9,527$; $\text{sig.}=0,000$). Oleh karena itu, penerapan GCG yang baik serta pengelolaan risiko kredit dan operasional yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas BPR di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, D. (2025). Analisis strategi penyelesaian kredit bermasalah di KC PD BPR Artha Galunggung Cabang Manonjaya. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 21–30.
- Alchuurun'ain, A., & Kurniawati, Y. (2025). Analisa kredit macet pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1503–1507.
- Amalia, M. V. (2022). Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap penyaluran kredit modal kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi COVID-19. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(4), 617–631.
- Ardiantini, L. E., & Susila, G. P. A. J. (2025). Pengaruh capital adequacy ratio, non-performing loan dan loan to deposit ratio terhadap return on asset pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 520–529.
- Arifin, S. (2025). Tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan dalam menghadapi era keuangan digital. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 27–33.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Fungsi pengawasan komisaris terkait kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan good corporate governance dan asas itikad baik. *Law Reform*, 14(2), 236–247.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Indraswari, I. G. A. A. P., Dewi, P. P. R. A., & Budiadnyani, N. P. (2024). Peran efisiensi operasional dan risiko kredit dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(4), 1115–1121.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2019). *Pedoman good corporate governance perbankan Indonesia*. KNKG.
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Swandari, S. (2025). *Lembaga keuangan bank dan non bank: Dinamika, regulasi, dan implementasi syariah*. PT. Nawala Gama Education.
- Munir, M. M. (2024). *Pengembangan model credit risk scoring untuk pembiayaan di lembaga keuangan syariah*. Institut PTIQ Jakarta.
- Nareswari, K. (2024). *Penerapan good corporate governance dalam proses bisnis dan operasional PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Nisa, C., Ichwani, T., Kurniawati, D., & Damayanti, A. (2025). *Tantangan keberlanjutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR): Dari kinerja hingga regulasi*. Deepublish.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pramudito, A., & Asri, M. (2023). Pengaruh keterbatasan SDM terhadap efektivitas penerapan GCG pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 18(2), 120–132.

- Pratiwi, R. C. (2018). *Analisis efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta].
- Putra, R. T. O. (2025). *Implementasi prinsip good corporate governance dalam manajemen risiko kredit pada BPRS Rajasa Lampung Tengah* [Skripsi, UIN Jurai Siwo Lampung].
- Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2026). Implementasi prinsip good corporate governance (GCG) pada bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 14–27.